

KEBIJAKAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL SEBAGAI STRATEGI MENGATASI KEMISKINAN

Oleh:

RR. E. Anggraeni Eksi Wahyuniw 2014

Abstract

Development focused on economic growth as the mainstream and application integration of women in development strategies in an effort to enhance the role of women in development for development to run efficiently and effectively. Development originally just relying on economic growth alone to be converted into human development paradigm that is fair, inclusive and sustainable. This paradigm emphasizes the importance of gender mainstreaming strategies to achieve equality of women and men as a prerequisite for achieving the development goals. One very important component in the strategy of gender mainstreaming is gender sensitive budgeting so that development funds are used to provide equitable benefits for the well-being of women and men.

Gender mainstreaming is a strategy for achieving gender equality through public policy. The purpose of gender mainstreaming is to change the policy of institutions / organizations become institutions / organizations with the structures and systems that are responsive to gender. Gender responsive budgets can not be separated from the implementation of the gender mainstreaming strategy. Gender-responsive budgeting is essentially an application of gender mainstreaming in budgeting. This is necessary to overcome poverty policies of gender responsive budgets. Requirements to implement gender responsive budget policy is the government's commitment to use the principles of transparency, participation, and accountability of budget management more optimal and efficient.

Keywords: mainstream gender, gender-responsive budgeting, poverty

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai usaha untuk menyejahterakan rakyatnya, perempuan dan laki-laki terutama mereka yang masih terbelit oleh kemiskinan. Pada masa kekuasaan Orde Baru usaha tersebut dilakukan melalui pembangunan berencana lima tahunan dan terlaksana selama kurun waktu kurang lebih tiga dasawarsa. Namun, bila ditilik hasilnya pembangunan yang sangat menekankan kepada pertumbuhan

ekonomi itu tidak berdampak sama terhadap kualitas hidup perempuan dan laki-laki.

Kesepakatan dalam Konferensi Perempuan Sedunia di Mexico City 1975, mendorong Pemerintah untuk mendirikan kementerian yang khusus menangani persoalan-persoalan perempuan. Kementerian ini menandatangani kebijakan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan yang dikenal dengan kebijakan Peningkatan Peranan Wanita (P2W), sebagai realisasi dari strategi pengintegrasian perempuan dalam pembangunan.

Pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi sebagai arus utama dan penerapan strategi pengintegrasian perempuan dalam pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan agar pembangunan berjalan secara efisien dan efektif. Namun, hal tersebut tidak menjadikan keadaan perempuan di Indonesia, terutama perempuan-perempuan miskin di pedesaan dan di perkotaan menjadi lebih baik. Keikutsertaan Indonesia dalam berbagai konferensi internasional seperti Konferensi Perempuan Sedunia kedua di Kopenhagen 1980, yang ketiga di Nairobi 1985, yang keempat di Beijing 1995, Konferensi tentang Kependudukan dan Pembangunan di Kairo, 1994 serta di berbagai konferensi Internasional lainnya seperti Konferensi Hak Azasi Manusia di Wina, Konferensi Dunia tentang Lingkungan di Rio de Janeiro, serta simposium-simposium regional tentang Perempuan dan Pembangunan di Manila 1993 dan di Bangkok tahun 2000, telah menumbuhkan pemikiran dan juga tindakan tentang perlunya perubahan paradigma pembangunan. Pembangunan yang semula hanya bertumpu kepada pertumbuhan ekonomi saja harus diubah menjadi paradigma pembangunan manusia yang adil, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Paradigma ini menekankan pentingnya strategi pengarusutamaan gender untuk mencapai kesetaraan perempuan dan laki-laki sebagai prasyarat untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut. Salah satu komponen yang sangat penting dalam strategi pengarusutamaan gender adalah

penganggaran yang sensitif gender agar dana pembangunan yang digunakan bisa memberi manfaat yang adil bagi kesejahteraan perempuan dan laki-laki.

Kajian Literatur dan Pembahasan

Arusutama Pembangunan dan Strategi *Women in Development* (WID)

Pembangunan adalah proses yang terencana dimana semua sumber daya, teknik-teknik, keahlian dikerahkan sebisa mungkin agar bisa diperoleh suatu pertumbuhan ekonomi. Pembangunan yang sangat bertumpu pada keberhasilan pertumbuhan ekonomi ini mengupayakan tingkat kemampuan produktif masyarakat dengan mengembangkan cara-cara produksi yang baru dan lebih baik yang memungkinkan terbentuknya kekayaan yang lebih besar (Saptari dan Holzner, 1997:110). Harapannya, jika pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan maka ia dengan sendirinya akan berdampak mengucur ke bawah sehingga semua rakyat, perempuan dan laki-laki dari berbagai lapisan sosial bisa menikmatinya. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses kuantitatif yang menyangkut proses ekonomi saja. Sedangkan pembangunan dalam arti luas adalah segala usaha untuk mencapai kesejahteraan manusia, perempuan dan laki-laki, dengan memenuhi kebutuhan pokoknya dan kebutuhan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, rekreasi, pembasmian kemiskinan, penciptaan kualitas kehidupan yang lebih baik berarti pembangunan tidak hanya menyangkut aspek ekonomi saja, tetapi juga aspek sosial, politik, dan budaya.

Pemerintah mulai menyadari bahwa perempuan yang jumlahnya lebih dari 50% dan menyadari bahwa perempuan dari penduduk Indonesia adalah sebuah potensi pembangunan yang telah disia-siakan. Oleh karena itu, dirasakan perlu untuk mengikutsertakan atau mengintegrasikan perempuan dalam proses pembangunan yang dikenal dengan strategi *Women in Development* (WID). Strategi ini dijalankan sejak akhir tahun 70-an selama kurang lebih hampir tiga dasawarsa.

Sasaran khusus WID adalah perempuan, karena perempuan Indonesia dianggap mengalami keterbelakangan, kebodohan, yang berarti pula perempuan adalah masalah bagi pembangunan dan karenanya perlu diikutsertakan dalam pembangunan agar pembangunan efektif dan efisien. Terdapat beberapa pendekatan dalam strategi integrasi WID diantaranya adalah pendekatan kesejahteraan, penekatan anti-kemiskinan, pendekatan keadilan, pendekatan efisiensi, pendekatan pemberdayaan (Moser, 1993).

Strategi WID memiliki banyak kelemahan yaitu (1) karena sasarannya perempuan maka program dan kegiatan-kegiatannya merupakan program dan kegiatan yang spesifik perempuan, (2) perempuan dilihat sebagai kategori sosial yang homogen padahal mereka berbeda menurut kelompok umur, status perkawinan, posisi sosial dalam keluarga, (3) kebijakan beserta program dan kegiatan yang spesifik perempuan itu didesain tidak melalui proses yang partisipatif tetapi dirancang, dan diputuskan oleh pemerintah pusat dan diteruskan ke pemerintah daerah sampai tingkat desa, (4) menganggap perempuan hanya penerima pasif pembangunan daripada sebagai pelaku pembangunan dalam mengubah kenyataan-kenyataan sosial, ekonomi, politik dan budaya selama ini mereka alami, (5) merupakan pendekatan yang tidak kritis terhadap struktur sosial yang ada yang kenyataannya sangat timpang, dan (6) karena itu pendekatan ini tidak mencari akar penyebab sistemik terjadinya ketidaksetaraan kualitas hidup perempuan dan laki-laki dalam masyarakat.

Strategi WID cukup berhasil dalam memenuhi kebutuhan praktis gender saja. Kebutuhan praktis gender adalah kebutuhan yang diidentifikasi berdasarkan peran perempuan dan laki-laki yang berbeda yang ditetapkan oleh budaya. Pemenuhan kebutuhan ini hanya merespon kebutuhan yang berkaitan dengan kondisi kehidupan perempuan yang tidak memadai seperti tidak tersedianya air bersih, kurangnya pelayanan kesehatan (terutama kesehatan reproduksi), rendahnya pendidikan perempuan, tingginya angka buta huruf perempuan, tingginya angka kelahiran, dan sebagainya. Strategi

WID tidak mampu menumbuhkan keadilan dan kesetaraan gender meskipun pemenuhan kebutuhan praktis gender itu sangat diperlukan.

Pendekatan *Gender and Development* (GAD) adalah pendekatan yang sensitif gender karena selain mengenali dan mempersoalkan perbedaan kondisi perempuan dan laki-laki juga harus mengenali dan mempersoalkan kesenjangan relasi diantaranya keduanya dan mencari akar penyebabnya sehingga dapat diupayakan penghapusannya. Pendekatan GAD memerlukan perubahan paradigma pembangunan. Pembangunan harus dilihat sebagai suatu proses yang menyeluruh, adil dan terintegrasi yang mampu memenuhi tidak saja kebutuhan ekonomi, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan sosial, politik, budaya, lingkungan, agama dan perbaikan kualitas hidup semua manusia, perempuan dan laki-laki (Taylor, 1999). Kemajuan pembangunan dengan paradigma baru ini tidak hanya diukur dengan indikator-indikator ekonomi, tetapi juga dengan indikator gender.

Indikator gender adalah persentase yang memperlihatkan keadaan perempuan dan laki-laki di berbagai bidang kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, upah, promosi jabatan, status sebagai pekerja, dan lain sebagainya. Indikator gender ini menandai berhasil atau tidaknya pembangunan manusia adil dan berkelanjutan.

Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Arusutama Pembangunan

Paradigma pertumbuhan ekonomi inilah yang selama lebih dari 30 tahun menjadi arusutama dalam pembangunan. Lembaga-lembaga arusutama seperti pemerintah, departemen dan non departemen, partai politik, parlemen, pendidikan, bank, penyandang dana, peranannya amat penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam lembaga-lembaga arusutama itulah berbagai kebijakan, perencanaan, keputusan yang mempengaruhi kehidupan ekonomi, politik, budaya, dan sosial rakyat dipertimbangkan dan ditentukan. Di dalam lembaga-lembaga itu disusun

berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai tindakan seperti program, kegiatan-kegiatan dan pelayanan publik untuk rakyat.

Pembangunan dengan paradigma baru yang menjadikan manusia sebagai pusat perhatiannya, memerlukan strategi pengarusutamaan gender. Inpres NO. 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender, menekankan pentingnya pengarusutamaan gender untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengarusutamaan gender merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah terhadap rakyat, perempuan dan laki-laki, agar memperoleh manfaat dari berbagai kebijakan, program, kegiatan yang dibuatnya untuk menyumbang kemajuan sosial, ekonomi, politik dan budaya daerah yang melaksanakannya.

Pengarusutamaan gender adalah strategi untuk mencapai kesetaraan gender melalui kebijakan publik. Tujuan pengarusutamaan gender adalah mengubah kebijakan lembaga-lembaga/ organisasi-organisasi menjadi lembaga/ organisasi dengan struktur dan sistemnya yang responsif gender. Lembaga/ organisasi arusutama mengupayakan kemajuan di berbagai bidang kehidupan meliputi ekonomi, sosial, budaya, agama, lingkungan dimana perempuan dan laki-laki sama-sama berkiprah di dalamnya secara adil dan menikmati kemajuan tersebut.

Hal-hal yang diarusutamakan adalah (1) legitimasi keadilan dan kesetaraan gender sebagai nilai fundamental yang harus tercermin dalam pembangunan dan di dalam praktik-praktik lembaga/ organisasi; (2) kesetaraan gender diakui sebagai prasyarat bagi pembangunan manusia yang adil, menyeluruh dan berkelanjutan yaitu kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu, pengarusutamaan gender merupakan suatu proses tranformatif jangka panjang ketika nilai-nilai sosial budaya yang selama ini dianut oleh masyarakat serta tujuan-tujuan pembangunan dikaji kembali (Melissa, 2000).

Mayoritas para perencana, pembuat kebijakan dan keputusan, serta para pelaksana lembaga-lembaga arusutama adalah laki-laki. Mereka adalah

bagian dari arus utama pembangunan sedangkan kaum perempuan yang nasibnya ditentukan oleh lembaga arus utama masuk ke dalam kelompok sosial yang terpinggirkan. Perempuan tidak memiliki akses, kontrol, dan peranan apapun dalam perencanaan dan pembuatan keputusan kebijakan, program dan kegiatan-kegiatannya, apalagi menikmati hasilnya.

Laki-laki (dan juga segelintir perempuan) memiliki akses dan kontrol lebih besar atas berbagai sumber daya pembangunan. Mereka merumuskan kebijakan, menjabarkannya ke dalam berbagai program dan kegiatan serta merancang anggaran untuk melaksanakannya. Namun, hampir semua dari mereka tidak memiliki kesadaran dan kepekaan gender. Mereka tidak mengenali dan mempersoalkan bahwa pengalaman hidup perempuan dan laki-laki berbeda. Implikasinya mereka tidak memahami perbedaan masalah, kebutuhan, kepentingan laki-laki dan perempuan. Mereka juga tidak mengenali dan mempersoalkan perbedaan kualitas hidup perempuan dan laki-laki serta mencari akar penyebabnya.

Ketidaksadaran dan ketidakpekaan perencana dan pelaksana kebijakan yang demikian itu melahirkan kebijakan yang mereka yakini sebagai pembangunan yang netral gender, artinya tidak berpihak kepada siapapun. Mereka tidak menyadari bahwa kebijakan dan program serta anggaran yang mereka buat adalah kebijakan, program dan anggaran yang buta gender dan berdampak beda bagi kualitas hidup perempuan dan laki-laki dimana perempuan adalah pihak yang tidak merasakan manfaat dari pembangunan.

Kebijakan dan Tujuan Pembangunan yang Responsif Gener

Anggaran responsif gender dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti anggaran gender (*gender budget*), anggaran sensitif gender (*gender sensitive budget*), analisis anggaran gender (*gender budget analysis*) dan *women's budget*, namun pada prinsipnya mengacu pada konsep yang sama. Anggaran responsif gender pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan tentang isu gender dan dampaknya

terhadap anggaran dan kebijakan, mendorong pemerintah yang akuntabel untuk menerjemahkan komitmen kesetaraan gender ke dalam anggaran dan mengubah anggaran dan kebijakan guna peningkatan kesetaraan gender.

Anggaran yang responsif gender tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender. Sebabnya, anggaran responsif gender pada intinya merupakan aplikasi pengarusutamaan gender dalam penyusunan anggaran. Anggaran responsif gender melihat anggaran pemerintah dimaksud secara utuh dari perspektif gender sekaligus mengkaji bagaimana alokasi dana tersebut mampu memenuhi aspirasi dan kebutuhan laki-laki dan perempuan yang berbeda.

Dalam melaksanakan pengarusutamaan gender, diperlukan suatu perencanaan yang peka gender agar dapat menghasilkan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender. Analisis kebijakan yang berbasis gender (*gender based policy analysis*) memiliki beberapa prinsip yaitu:

1. Setiap kebijakan, program, kegiatan, dan pelayanan publik akan berdampak terhadap kehidupan manusia, perempuan dan laki-laki.
2. Perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan peran, akses, dan kontrol terhadap berbagai sumber daya strategis.
3. Perempuan bukan kategori sosial yang homogen. Mereka berbeda menurut kelas sosial, tempat tinggal, status perkawinan, kelompok umur, status di dalam keluarga, kelompok etnis sehingga pengalaman, permasalahan, kebutuhan, kepentingan mereka juga berbeda.
4. Demikian pula peran, pengalaman, permasalahan, kebutuhan dan kepentingan perempuan berbeda dari laki-laki.
5. Setiap kebijakan, program, kegiatan, pelayanan publik harus adil bagi perempuan dan laki-laki. Adil tidak berarti memberikan perlakuan yang sama terhadap keduanya. Perlakuan yang sama belum tentu berdampak sama terhadap mereka sebab kondisi mereka berbeda.
6. Kebijakan, program, kegiatan, pelayanan publik yang telah dibuat melalui proses analisis gender perlu dikonsultasikan kepada perempuan dan laki-

laki yang akan terkena dampaknya. Hal tersebut dilakukan agar partisipasi rakyat dapat terwujud.

7. Analisis gender tidak terbatas pada analisis kebijakan program, kegiatan, dan pelayanan publik saja. Termasuk didalamnya merancang anggaran/ dana yang akan digunakan apakah rancangan anggaran/ dana itu sudah sensitif gender atau belum. Artinya, apakah anggaran/ dana akan memberikan manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki.

Agar pengarusutamaan gender efektif diperlukan kemauan politik dan kepemimpinan; kerangka kerja kebijakan; struktur, mekanisme dan proses-proses kelembagaan; mekanisme evaluasi kerja; sumber daya manusia yaitu personil lembaga-lembaga arusutama yang sadar, peka, dan responsif gender; dana yang cukup yang responsif gender.

Beberapa prinsip utama untuk membuat penganggaran berperspektif gender (*gender budgeting*) dapat secara efektif diterapkan yaitu:

- 1. Kemauan Politik yang Efektif**

Anggaran sesungguhnya sebuah refleksi dari prioritas pemerintah atau lembaga donor dalam menentukan keputusan pembangunan mereka. Untuk membuatnya berlangsung dengan efisien pemerintahan atau lembaga-lembaga donor perlu untuk memformulasi kebijakan mereka dengan menyesuaikan pada ratifikasi-ratifikasi internasional tentang perempuan. Pendekatan politik dan alat analisis yang dipergunakan akan menghasilkan sesuatu yang bermakna bila berlandaskan pada instrumen legal tersebut.

- 2. Peningkatan Kesadaran dan Advokasi**

Inisiatif penganggaran berperspektif gender akan berhasil jika lebih banyak lagi aktor-aktor yang terlibat didalamnya. Aktor bukan saja dari dalam pemerintahan, yang lebih penting justru keterlibatan kelompok-kelompok advokasi dan masyarakat madani untuk mendorong anggaran yang efisien sebagai prioritas politik.

3. Transparansi dan Partisipasi

Transparansi anggaran jelas menjadi syarat mutlak agar inisiatif penganggaran yang berperspektif gender dapat dilaksanakan. Tahapan-tahapan penganggaran mesti melibatkan keterwakilan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, ahli-ahli anggaran, ahli-ahli gender, dan berkesesuaian dengan prinsip yang tertuang dalam konstitusi dan kerangka kerja hukum lainnya. Peningkatan kapasitas bagi mereka menjadi sesuatu yang tidak terelakkan.

Kebijakan anggaran pembangunan, seperti halnya kebijakan pembangunan sering diasumsikan akan berdampak sama terhadap semua orang, perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu, seringkali suatu rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dibuat oleh pemerintah dan diajukan ke DPR atau DPRD menjadi anggaran yang netral gender. Suatu anggaran yang tidak berpihak kepada siapapun yang secara implisit anggaran itu dibelanjakan untuk kemaslahatan perempuan dan laki-laki.

Anggaran yang diyakini netral gender menjadikan perempuan berada dalam posisi yang tidak setara dengan laki-laki karena rendahnya partisipasi mereka dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama sebagai perencana dan pembuat keputusan. Akibatnya, perempuan tidak menikmati apapun dari kebijakan dan anggaran pembangunan yang netral gender. Jika kebijakan pembangunan dan tujuannya tidak responsif gender maka sangat tidak mungkin anggaran yang digunakan untuk mendanai program kegiatan, serta pelayanan publik akan responsif gender. Suatu anggaran yang tidak berdampak sama bagi perbaikan kualitas hidup perempuan dan laki-laki karena proses pembuatan dan pengesahannya tidak menggunakan analisis anggaran yang sensitif gender maka anggaran yang disahkan menjadi undang-undang itu bukan anggaran yang netral gender tetapi anggaran yang buta gender (*gender blind*). Lebih parah lagi ia sering menjadi anggaran yang

diskriminatif gender (diskriminatif terhadap perempuan) meskipun hal tersebut bukan kesengajaan yang direncanakan.

Lembaga-lembaga pemerintah dan DPR (pusat dan daerah) adalah dua dari sekian lembaga arusutama. Dalam pengarusutamaan gender, terutama dalam merancang dan mengesahkan RAPBN dan RAPBD, kedua lembaga ini seharusnya menggunakan analisis anggaran yang sensitif gender, data terpilah menurut jenis kelamin sangat diperlukan untuk menghapus mitos kebijakan dan anggaran yang netral gender. Data tersebut akan memperlihatkan siapa yang bekerja, siapa yang mendapatkan subsidi, beasiswa, tunjangan anak, fasilitas perumahan, transportasi, kesehatan dan sebagainya dan siapa pula yang memperolehnya.

Cermin Anggaran di Indonesia

Pada masa lalu pemerintah mengalokasikan 1% dari anggaran belanja negara untuk pembangunan dalam upaya menggiatkan perempuan melalui kegiatan-kegiatan pembangunan yang dikenal dengan Peningkatan Peranan Wanita (P2W). Dana ini disalurkan pada Kantor Menteri Urusan Negara Peranan Wanita dan semua departemen maupun lembaga-lembaga pemerintah non departemen untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan praktis perempuan. Anggaran tersebut bukan anggaran yang sensitif (atau anggaran yang responsif) gender tetapi anggaran khusus untuk perempuan. Permendagri No.132 Tahun 2003 telah mengubah dana 1% menjadi 5% untuk upaya pemberdayaan perempuan. Sisanya, 95% adalah alokasi anggaran yang menurut para perencana dan pembuat keputusan adalah anggaran yang netral gender. Alokasi 5% anggaran belanja untuk upaya pemberdayaan perempuan tidak bisa dikatakan sebagai anggaran yang responsif gender. Anggaran responsif gender bukan berarti anggaran yang khusus untuk pemberdayaan perempuan 5% dan dana yang lain untuk pembangunan lainnya.

Apabila pemerintah (pusat dan daerah) konsisten menggunakan strategi pengarusutamaan gender, bukan berarti pengalokasian 5% khusus untuk upaya pemberdayaan perempuan dan sisanya untuk laki-laki. Pengarusutamaan gender dilakukan secara menyeluruh di semua sektor agar bisa dihasilkan kebijakan, program, kegiatan, dan pelayanan publik yang responsif gender. Maka anggaran pembangunan yang digunakan di masing-masing sektor seharusnya sebesar 100%. Dalam hal ini tidak ada pemilahan anggaran belanja untuk pembangunan menurut jenis kelamin tetapi anggaran tersebut bisa memberi manfaat dalam memperbaiki kualitas hidup keduanya.

Di bawah ini beberapa contoh data gender (kualitatif) yang mengungkap adanya diskriminasi gender dalam anggaran pengeluaran rutin negara, perkebunan (BUMN), dan bank. Apabila suami istri sama-sama bekerja sebagai pegawai negeri, maka tunjangan keluarga, dalam hal ini tunjangan anak, kepada suami isteri yang bekerja itu dipersilahkan memilih kepada siapa tunjangan anak itu diberikan kepada isteri atau kepada suami? Maka sang isteri yang memiliki hak pilih akan menunjuk kepada suaminya yang menerima tunjangan keluarga sebab menurut ideologi gender yang telah dikukuhkan dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974, suami adalah kepala keluarga dan pencari nafkah utama keluarga.

Para perempuan pekerja pemetik teh di salah satu perkebunan di Jawa Barat yang telah berkeluarga dan mempunyai anak, semula diperlakukan sebagai pekerja dan sebagai ibu. Sebagai ibu dan pekerja, peran mereka dihargai oleh pihak perkebunan yaitu dengan diberikannya tunjangan anak dan berbagai fasilitas lain sebagai pekerja, misalnya, fasilitas penitipan anak, sekolah taman kanak-kanak, klinik kesehatan ibu dan anak. Namun, dengan berubahnya kebijakan anggaran perkebunan yaitu yang semula memperlakukan perempuan pekerja sebagai ibu dan juga sebagai pekerja menjadi sebagai isteri yang bekerja yang disebut sebagai pekerja perempuan. Kebijakan perkebunan tersebut menjadikan para perempuan pekerja pemetik teh tidak lagi memperoleh tunjangan anak dan berbagai fasilitas dari

perkebunan sebagai pekerja. Alasannya, isteri bukan sebagai pencari nafkah utama tetapi sebagai pencari nafkah tambahan. Mereka adalah tanggungan suami termasuk anak-anak mereka. Oleh karena itu, semua biaya yang sebelumnya diperuntukkan para perempuan pekerja, kecuali upahnya, tidak lagi dikeluarkan. Sebaliknya, laki-laki pekerja yang memperoleh berbagai fasilitas dan tunjangan untuk keluarga.

Kebijakan pemerintah atau swasta seperti ini tidak melihat kenyataan bahwa di dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga tidak selalu terjadi relasi sosial antara suami isteri (antar gender) dan juga antar generasi yang seimbang, selaras, dan serasi, seperti yang selalu didengungkan oleh pemerintah rejim Orde Baru. Tetapi yang sering terjadi adalah konflik-konflik kepentingan di antara anggota keluarga dimana perempuan sebagai isteri, ibu, anak, keponakan, cucu tidak berada pada posisi setara dengan laki-laki sebagai suami, ayah, saudara, paman, kakek. Alokasi penghasilan rumah tangga memperlihatkan adanya kecenderungan para isteri menggunakan penghasilannya tersebut untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota rumah tangga sehari-hari daripada untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Bagi perempuan, prioritas utama penggunaan penghasilan mereka dilandasi oleh tujuan mencapai kondisi kehidupan yang lebih baik bagi anak-anaknya sebagai keterikatan perempuan (dan laki-laki) kepada ideologi maternal altruism yang selalu ditekankan oleh masyarakat kepada kaum perempuan. Sedangkan bagi laki-laki, prioritas tidak harus diberikan untuk mencapai tujuan kolektif sebagai keluarga yaitu mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga dengan memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, sebab mereka menganggap bahwa dirinya memiliki hak untuk lebih banyak mengalokasikan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Selain itu ada kecenderungan bahwa jika penghasilan suami jauh lebih besar daripada penghasilan isteri, posisi tawar perempuan di dalam keluarga akan lebih lemah daripada suaminya dalam berbagai pengambilan keputusan. Jika isteri tidak memiliki kesempatan untuk

terlibat dalam pengambilan keputusan, jelas akan berdampak negatif terhadap kehidupan perempuan, apalagi jika isteri tidak bekerja.

Anggaran sensitif atau responsif gender atau disebut *budget gender* bukanlah anggaran yang terpisah untuk perempuan dan laki-laki, tetapi merupakan anggaran yang dibuat dan disahkan melalui suatu proses analisis gender yang dilakukan oleh para perencana dan pembuat kebijakan. Kesadaran dan kepekaan gender para perencana dan pembuat kebijakan dan anggarannya serta para pengesah anggaran, perempuan dan laki-laki, sangat diperlukan.

Diane Elson (1990) bersama-sama dengan UNIFEM telah mengembangkan seperangkat peralatan untuk melakukan analisis anggaran yang sensitif gender (Curran, J., 2000:12-13). Terdapat enam alat yang bisa digunakan:

1. *Assesment* penerima manfaat pelayanan publik dan prioritas anggaran menurut jenis kelamin (*Gender-Disaggregated Beneficiary Assesment of Public Delivery and Budget Priorities*) bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis opini perempuan dan laki-laki tentang apakah pelayanan publik telah memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki dan sejauh mana dana yang akan dialokasikan sesuai dengan kepentingan perempuan dan laki-laki.
2. Analisis tentang luasnya manfaat pengeluaran untuk publik menurut jenis kelamin (*Gender-Disaggregated Public Expenditure Benefit Incidence Analysis*) bertujuan untuk menganalisis sejauh mana perempuan, anak-anak perempuan dan anak-anak laki-laki, memperoleh anggaran dari pelayanan publik.
3. Evaluasi kebijakan anggaran pengeluaran yang responsif gender menurut sektor (*Gender-Aware Policy Evaluation of Public Expenditure by Sector*) bertujuan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang mendasari diberikannya anggaran untuk mengidentifikasi dampaknya terhadap

- perempuan dan laki-laki. Apakah kebijakan-kebijakan itu mengurangi, meningkatkan atau tetap tidak mengubah perbedaan gender yang ada.
4. *Statement anggaran pengeluaran yang responsif gender (Gender-Aware Budget Expenditure Statement)* bertujuan untuk memperlihatkan implikasi yang diharapkan dari perkiraan (estimasi) pengeluaran dalam mengatasi isu kesenjangan gender dalam pengertian pengeluaran publik keseluruhan dan pengeluaran menurut kementerian sektoral.
 5. Analisis dampak anggaran terhadap penggunaan waktu menurut jenis kelamin (*Gender-Disaggregated Analysis of Impact of Budget on Time Use*) bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara anggaran nasional dan penggunaan waktu anggota rumah tangga, sehingga bisa memperlihatkan dampak kebijakan makro-ekonomi terhadap pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar untuk kegiatan-kegiatan reproduksi sosial. Yaitu, waktu yang digunakan untuk mengurus anggota keluarga dan komunitas, orang-orang yang sakit, mengumpulkan kayu bakar dan mengambil air, memask, membersihkan rumah, mengasuh dan mendidik anak, dan sebagainya yang dilakukan perempuan.
 6. Kerangka kerja kebijakan makro-ekonomi jangka menengah yang responsif gender (*Gender-Aware Medium-Term Macroeconomic Policy Framework*) bertujuan untuk menciptakan suatu kerangka kerja kebijakan makro-ekonomi jangka menengah dengan mempertimbangkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam kegiatan ekonomi.

Potret anggaran belanja tidak jauh beda dengan hasil analisis terhadap anggaran pendapatan. Dalam anggaran belanja analisis sosial, khususnya analisis gender masih belum digunakan dalam menentukan alokasi belanja maupun dalam pelaksanaan belanja. Akibatnya kebijakan anggaran yang seharusnya menjadi salah satu instrumen untuk melakukan distribusi sumber daya untuk mengurangi kesenjangan, justru yang terjadi sebaliknya. Kebijakan anggaran yang netral tidak saja sumir dalam penetapan alokasi anggaran maupun target sarannya karena berangkat dengan asumsi bahwa

anggaran diperuntukkan bagi semua warga negara, jadi analisa sosial tidak perlu dilakukan. Paradigma ini menegaskan adanya perbedaan kebutuhan dan tingkat aksesibilitas maupun kontrol masyarakat terhadap sumber daya.

Kebijakan anggaran yang melihat warga negara tanpa wajah tersebut jelas-jelas mengabaikan adanya perbedaan kebutuhan antara si miskin dan si kaya, antara perempuan dan laki-laki, antara lansia dan remaja, dan lain sebagainya. Dampaknya anggaran tidak dirasakan masyarakat secara merata. Kelompok elit dan laki-laki yang selama ini menjadi kelompok utama memperoleh akses, kontrol dan mendapatkan manfaat anggaran jauh lebih baik dibandingkan dengan perempuan. Sebaliknya perempuan menjadi kelompok yang tidak dapat bergeming lebih jauh dari posisinya semula. Kesenjangan yang memang telah ada sebagai produk sejarah, sosial, dan budaya gagal untuk diatasi. Hal ini antara lain disebabkan oleh kebijakan anggaran yang netral.

Anggaran Responsif Gender Dalam Usaha Penemtasan Kemiskinan

Permasalahan besar dan belum terselesaikan hingga saat ini adalah belum tercapainya kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan sebagian dari bangsa kita masih berada dalam kehidupan serba kekurangan atau golongan miskin. Kemiskinan di Indonesia terjadi bukan hanya di perkotaan tetapi juga di pedesaan. Berbagai kebijakan diputuskan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan ini namun hingga saat ini jumlah penduduk miskin belum berkurang bahkan cenderung bertambah. Salah satu penyebab ketidakberhasilan ini adalah tidak tepatnya sasaran kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan suatu persoalan yang kompleks dan multidimensi oleh karena itu pemecahannya pun harus secara menyeluruh. Kemiskinan tidak hanya dilihat dari tidak terpenuhinya kebutuhan konsumsi masyarakat, karena persoalan kebutuhan konsumsi hanya salah satu dimensi dari persoalan kemiskinan. Memandang kemiskinan sebagai persoalan yang

multidimensi akan menyadarkan kita bahwa jumlah yang selama ini disebut sebagai jumlah kelompok miskin akan semakin membesar. Kondisi ini bisa kita lihat bila kita mengacu pada definisi yang dikemukakan oleh strategi penanggulangan kemiskinan. Definisi tersebut menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan kondisi seseorang, laki-laki dan perempuan, yang tidak dapat memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar yang dimaksud meliputi hak atas pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman, dan hak untuk berpartisipasi dalam keseluruhan pembangunan. Berdasarkan dimensi di atas maka kemiskinan bukan sekedar tidak terpenuhinya pangan, atau rendahnya pendapatan tetapi juga kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.

Pemahaman kemiskinan secara parsial juga akan membuat kita terjebak dalam penyelesaian permasalahan kemiskinan pada gagasan pertumbuhan ekonomi tinggi, yang tidak mepedulikan kualitas dari pertumbuhan itu sendiri. Hal inilah yang sering kali kita lihat dalam program-program kemiskinan yang diterapkan tidak pernah menyelesaikan akar permasalahan kemiskinan yang sesungguhnya. Program kemiskinan seperti Jaring Pengamanan Sosial (JPS) dengan berbagai variasinya lebih banyak bersifat sektoral dan suatu pemberian yang tidak berdampak jangka waktu yang lama.

Selain kenyataan kemiskinan yang meliputi banyak dimensi, kemiskinan juga tidak menunjukkan keseragaman permasalahan. Setiap daerah memiliki karakteristik kemiskinan yang tidak dapat diseragamkan. Oleh karena itu, proses pelaksanaan program juga tidak dapat bersifat *top down* yang tidak mempertimbangkan karakteristik kemiskinan di masing-masing daerah. Program pengentasan kemiskinan yang bersifat *top down* yang selama ini dijalankan lebih banyak mematikan inisiatif dan daya kreatif lokal dan tidak mengatasi prioritas kebutuhan masyarakat miskin setempat.

Melihat kondisi-kondisi pengentasan kemiskinan yang selama ini dijalankan, menjadi penting untuk melihat kembali sasaran atau target dari program tersebut. Analisis gender sangat diperlukan agar kebijakan memihak pada kelompok rentan (*vulnerable groups*). Analisis gender diperlukan karena selama ini perempuan seringkali tidak tersentuh oleh kebijakan pengentasan kemiskinan. Sedangkan keterlibatan kelompok miskin dalam kebijakan perlu dilakukan agar program yang dibentuk akan dapat menyelesaikan akar permasalahan kemiskinan yang sesungguhnya.

Persoalan kemiskinan terutama bagi perempuan tidak dapat dilepaskan dari proses anggaran yang dibuat oleh pemerintah. Anggaran pemerintah yang selama ini disusun kurang memperhatikan kondisi perempuan yang miskin. Hal ini mengakibatkan kebijakan anggaran tidak menyentuh akar permasalahan kemiskinan.

Persoalan tersebut tidak terlepas dari permasalahan gender yang terdapat dalam proses anggaran, yang diantaranya adalah:

1. Birokrasi yang mengkoordinasikan semua proses anggaran masih didominasi laki-laki. Birokrat belum memiliki *mind set* yang cukup mengenai gender.
2. Keterlibatan perempuan pada tahap perencanaan masih sangat sedikit, hal ini mengakibatkan kebutuhan praktis dan strategi perempuan jarang atau bahkan tidak dipertimbangkan dalam menyusun program. Kondisi ini menyebabkan alokasi anggaran tidak memperhitungkan kebutuhan tersebut.
3. Keterlibatan perempuan menunjukkan gejala yang sama dalam proses anggaran selanjutnya, seperti dalam proses pengesahan, dominasi laki-laki sangat kuat, dan minimnya keterlibatan perempuan dalam pengimplementasian anggaran.
4. Pada proses evaluasi selain keterlibatan sangat minim, perempuan juga memiliki keterbatasan dalam mengakses data dan informasi anggaran.

Untuk mengatasi keadaan ini diperlukan kebijakan anggaran yang responsif gender. Persyaratan untuk menerapkan kebijakan anggaran yang responsif gender adalah adanya komitmen pemerintah untuk menggunakan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran yang lebih optimal dan efisien. Untuk mengetahui anggaran yang ada sudah responsif gender, dapat dilakukan dengan melihat apakah anggaran yang ada telah memperhatikan: (1) pembebanan sumber-sumber penerimaan diantara berbagai kelompok dalam masyarakat sudah berlaku adil. Kelompok dalam masyarakat meliputi jenis kelamin, unit usaha, dan rumah tangga. (2) Hambatan yang akan menghalangi perempuan terlibat secara substansial dalam seluruh proses anggaran.

Untuk mengintegrasikan analisis gender dalam kebijakan pengentasan kemiskinan maka perlu dilakukan hal-hal berikut:

1. Memperhatikan perbedaan pengalaman kemiskinan perempuan dan laki-laki sehingga dapat diidentifikasi sebab-sebab terjadinya kemiskinan dan dampak yang ditimbulkannya.
2. Kemiskinan juga menyangkut hal-hal apa yang dialami oleh kaum miskin dalam kondisinya. Harus dilihat apakah laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman yang berbeda mengenai kondisi kemiskinannya.
3. Apakah ada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam akses dan kontrol pada bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Seberapa besar ketimpangan tersebut berbasiskan pada persoalan gender.
4. Memperhatikan pembagian peran domestik dan publik di antara perempuan dan laki-laki yang berdampak pada rendahnya partisipasi perempuan di sektor publik. Hal ini yang kemudian menjadi penyebab rendahnya partisipasi perempuan pada sektor ekonomi, perbedaan upah yang diterima perempuan dibandingkan laki-laki.
5. Menganalisis kebijakan yang ada dan merekomendasikan adanya analisis gender dalam kebijakan yang dibuat untuk mengentaskan kemiskinan gender.

Proses pengintegrasian gender dalam program pengentasan kemiskinan, dimulai dari pembuatan kebijakan, implementasi, dan pengevaluasian dampak dari program yang dibuat. Pengintegrasian tersebut diantaranya dapat dilihat dalam hal-hal berikut, yaitu :

1. Kelembagaan

Keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga pembuat kebijakan menjadi syarat mutlak untuk tercapainya perumusan program pengentasan kemiskinan yang berkeadilan gender. Selain itu keterwakilan perempuan sangat penting untuk menyuarakan kebutuhan dan kepentingan perempuan dalam program pengentasan kemiskinan itu sendiri.

2. Analisis

Pada setiap tingkatan isu gender harus selalu menjadi bagian yang didiskusikan dan harus tercermin dalam setiap dimensi kemiskinan yang ditentukan. Analisis gender ini diperlukan untuk dapat menemukan perbedaan pengalaman antara laki-laki dan perempuan dalam menghadapi kondisi kemiskinannya.

3. Sosialisasi dan Konsultasi

Penggunaan perspektif gender harus sudah tercermin dalam setiap proses pengimplementasian program. Dimulai dari sosialisasi program dan dalam setiap tahap konsultasi publik yang dilakukan. Pengalaman yang didapat dalam sosialisasi dan konsultasi dicatat dan dijadikan masukan dalam pengimplementasian gender pada program pengentasan kemiskinan.

4. Struktur Data

Sejak awal data yang dikumpulkan harus dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Disamping itu juga harus diperhatikan unit analisisnya, apakah berbasis pada keluarga, kelompok lokal atau nasional. Untuk menangkap ketimpangan gender yang ada, data tidak dapat dilepaskan dari analisis

gender. Sehingga setiap data yang didapat harus disertai analisis berdasarkan perbedaan gender.

5. Pemantauan dan Evaluasi

Perempuan harus terlibat dalam proses pemantauan dan evaluasi. Hal ini diperlukan untuk melihat hasil dari implementasi program pengentasan kemiskinan yang telah berbasis analisis gender.

Pengentasan kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari kebijakan yang didesain dalam bentuk program pembangunan yang menempatkan keadilan gender dalam setiap programnya. Program pembangunan seperti ini memerlukan komitmen dari pimpinan antara laki-laki dan perempuan dalam memformulasikan program pembangunan yang responsif gender dan pro orang miskin, juga dalam implementasinya melibatkan orang miskin dalam setiap proses.

Untuk mewujudkan program pembangunan yang memberikan kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki perlu diperhatikan beberapa hal berikut:

1. Kebijakan Ekonomi dan Proses Anggaran

Anggaran yang responsif gender harus diusahakan tercermin program dan kegiatan yang dibuat oleh pemerintah. Diperlukan juga peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam proses anggaran, dengan strategi melibatkan masyarakat dalam implementasinya, sehingga tercapai partisipasi dan keadilan yang obyektif dalam alokasi anggaran. Selain itu, kebijakan ekonomi makro dan kerangka kebijakan yang disusun harus memberikan peluang bagi perempuan dan laki-laki. Selain itu, pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan yang responsif gender harus juga membangun jaringan dengan organisasi di luar pemerintah yang mampu memobilisasi kelompok-kelompok dalam masyarakat, terutama kelompok perempuan miskin.

2. Demokratisasi

Keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik di tingkat lokal maupun nasional harus terus ditingkatkan, baik dalam proses pemilu maupun dalam lembaga-lembaga pembuat kebijakan. Hal yang menjadi penting dibangun adalah hubungan antara perempuan dalam struktur politik dengan perempuan di luar struktur politik. Kapasitas perempuan yang mewakili perempuan dalam politik harus terus ditingkatkan agar keterlibatan mereka dalam proses-proses legislatif semakin besar.

3. Hak-hak Hukum

Hak-hak hukum yang dimaksudkan disini, baik berupa hak-hak perempuan atas sumber daya maupun berupa kesadaran perempuan akan hak-haknya. Perempuan harus lebih diberi dukungan dalam menyadari haknya secara sosial maupun ekonomi. Kajian-kajian terhadap hukum adat yang menghalangi hak-hak atas sumber daya perlu menjadi perhatian. Tidak kalah pentingnya adalah perempuan harus mendapat bantuan hukum dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pekerjaan mereka maupun persoalan pribadi yang dialami dalam keluarga. Bantuan hukum ini dapat disalurkan melalui organisasi-organisasi yang secara langsung berhubungan dengan perempuan miskin.

4. Badan-badan Nasional dan Pelayanan Sektor Publik

Restrukturisasi dalam badan-badan nasional perlu dilakukan terutama dalam meningkatkan jumlah dan kapasitas pelayan publik di lini depan. Perempuan yang bekerja dalam sektor peningkatan kapasitas perempuan harus berhubungan dengan organisasi di masyarakat yang berkaitan dengan bidangnya. Badan-badan yang melayani publik harus mampu menyediakan pelayanan sesuai keinginan publik. Kualitas pelayanan mesti ditingkatkan hingga klien atau masyarakat dapat memilih petugas berdasarkan gendernya, yang dianggap mampu menyelesaikan

persoalannya. Insentif maupun hukuman bagi para pekerja maupun klien dibuat dengan memperhatikan keadilan gender.

5. Desentralisasi

Akuntabilitas dan kemampuan analisis anggaran pada tingkat pemerintah daerah atau lokal menjadi sangat penting ditingkatkan. Karena sesungguhnya kebijakan di tingkat nasional pada akhirnya sangat ditentukan pada program kebijakan di tingkat lokal. Mulai dari perencanaan hingga evaluasi program kemiskinan harus memperhatikan analisis gender. Keputusan dan peraturan yang disusun pemerintah lokal harus mengakomodasi kepentingan aktivitas sektor informal perempuan yang umumnya merupakan kegiatan produktif dari perempuan miskin.

6. Sektor Swasta

Proses pasar yang memperhatikan gender perlu ditingkatkan. Intervensi dapat diberikan diantaranya pada peraturan ketenagakerjaan yang meliputi pekerja yang tidak dilindungi, pembentukan serikat pekerja sektor informal, dan perkumpulan pekerja harian di berbagai sektor. Hal lain yang perlu dipikirkan adalah pembentukan badan khusus yang memiliki kewenangan untuk mengawasi kesetaraan gender, baik pada sektor swasta maupun publik.

7. Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil harus juga diperhatikan untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dengan memperhatikan keadilan gender. Bantuan pada masyarakat sipil dapat diberikan pada usaha pembentukan jaringan diantara kelompok miskin perempuan. Selain itu, dukungan juga harus diberikan pada organisasi masa yang aktif berupaya memberikan layanan yang secara langsung berhubungan dengan program menurunkan angka kemiskinan. Memberikan bantuan pada organisasi masa yang menyadarkan pentingnya gender dalam memperbaiki kehidupan sosial, ekonomi dan politik, khususnya yang mendukung kebutuhan kelompok miskin juga sangat penting.

8. Keluarga

Perlunya pembentukan kebijakan dan peraturan yang memberikan alternatif pilihan dan fleksibilitas bagi pengaturan keluarga. Pemberian status yang sama bagi variasi tipe keluarga yang terbentuk dalam masyarakat. Dengan demikian, keluarga dapat mengatur pembagian peran sesuai dengan kondisi dari perempuan dan laki-laki yang terlibat dalam keluarga. Penguatan peraturan atau mekanisme pencegahan perempuan menjadi miskin karena perceraian atau karena ditinggalkan keluarganya. Pemberian bantuan sosial pada laki-laki atau perempuan yang dibebani perawatan anak.

Penutup

Kemiskinan merupakan suatu persoalan kompleks. Dengan demikian penyelesaian permasalahan ini harus meliputi banyak dimensi. Kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan yang selama ini diterapkan hanya meliputi satu dimensi, misalnya peningkatan pendapatan.

Kebijakan pengentasan kemiskinan satu dimensi tersebut tidak mampu mencakup persoalan kemiskinan yang dialami perempuan. Di sisi lain feminisasi kemiskinan muncul sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kemiskinan. Realita sosial menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman yang berbeda mengenai kemiskinannya.

Penerapan analisis gender dalam kehidupan masyarakat berkaitan dengan gerakan feminisme harus dilihat dari perspektif kebijakan yang memberi ruang bagi laki-laki dan perempuan dalam semua aspek. Gerakan ini prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan di antara laki-laki dan perempuan dalam mencapai akses terhadap sumber daya yang ada, tetapi di sisi lain perjuangan feminisme seringkali tidak hanya mendapat tantangan dari masyarakat namun juga dari pemerintah.

Untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya analisis gender terutama dalam mengatasi persoalan kemiskinan maka setiap kebijakan yang

dibuat oleh pemerintah harus mengintegrasikan analisis gender, baik dalam perencanaan, implementasi maupun dalam mengevaluasi program pengentasan kemiskinan. Selain itu program pembangunan juga perlu mengedepankan kerjasama antara laki-laki dan perempuan, baik dalam sektor publik maupun sektor domestik.

Persoalan kemiskinan terutama bagi perempuan tidak dapat dilepaskan dari proses anggaran. Proses anggaran yang dibuat pemerintah harus responsif terhadap persoalan gender. Untuk menghasilkan anggaran yang responsif gender keterlibatan perempuan dalam proses anggaran perlu ditingkatkan. Dengan anggaran yang responsif gender diharapkan program kemiskinan yang dibuat akan menyentuh sasaran pada orang miskin dan berdimensi gender.

Daftar Pustaka

Budlender, Debbie dan Rhonda Sharp dengan Kerri Allen K (1998), *How to Do A Gender-Sensitive Budget Analysis: Contemporary Research and Practice*, Commonwealth Secretariat

Edriana Nurdin, 2006, *Strategi Mengentaskan Kemiskinan Berbasis Gender dalam Potret Kemiskinan Perempuan*, Women Research Institute, Jakarta

Innes, Melissa (ed), 2000, *Accelerating Change: Resources for Gender Mainstreaming*, CIDA, Asia Branch

Mastuti, et al., 2003, *APBD Responsif Gender*, CiBa, Jakarta

M. Masykur Riyadi, Dedi, 2006, *Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender*, Bali

Michael Sherraden, 2006, *Aset untuk Orang Miskin: Perspektif Baru Usaha Pengentasan Kemiskinan*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

Mundayat Aris, dan kawan-kawan (2006), *Studi Dampak Advokasi Anggaran Berkeadilan Gender*, Jakarta: Women Research Institute

Jaorana Amiruddin dan Rinusu, 2002, *Anggaran Berperspektif Gender: Menuju Keadilan Gender*

Journal Perempuan (2006, No.46), *Sudahkah Anggaran Kita Sensitif Gender?*

Rinusu dan Sri Mastuti, 2003, *Panduan Praktis Mengontrol APBD*, Jakarta: CiBa dan Fes

Sally Banden, 2003, *Konsep Gender, Tata Pemerintahan, dan Feminisasi Kemiskinan dalam Partisipasi Politik Perempuan dan Tata Pemerintahan yang Baik: Tantangan Abad 21*, UNDP, Jakarta

Sri Mastuti dan Rinusu, 2003, *APBD Responsif Gender*, CiBa dan *The Asia Foundation*, Jakarta

Wayne Parson, 2001, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Jakarta: Prenada Media